

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ADAT BAYAN DI LOMBOK UTARA TAHUN 2015-2016¹

Disusun oleh :

TRIATURRAHMAN²

20120520007

SINOPSIS

Skripsi ini mengambil judul "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan Di Lombok Utara Tahun 2015-2016". Latar belakang masalah penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat Bayan yang dapat menjadikan masyarakat adat Bayan memiliki daya di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan dan untuk menghilangkan traumatis kaitanya dengan pembangunan pada era sebelumnya yang memandang bahwa masyarakat sebagai obyek bukan subyek, sehingga diharapkan pada era terdesentralisasinya pemerintahan Lombok Utara pada saat ini masyarakat lebih diperhatikan dalam pembangunan sebagai subyek atau mitra, dan dapat ikut terlibat dimulai sejak identifikasi masalah, perencanaan, sampai pelaksanaan kegiatan. Maka diperlukan program pemberdayaan yang bersifat *people centered development*. BPMPPKBPEMDES dalam hal pemberdayaan mewakili pemerintah untuk mengemban tugas tersebut, yakni dengan membentuk lembaga BUMDES yang diperuntukan sebagai incubator yang bergerak dibidang usaha dan sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat asli desa Bayan dan pemerintah yakni BPMPPKBPEMDES sebagai badan yang membawahi dan membina lembaga tersebut baik. Rumusan masalah yang di ambil adalah Apa Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan dan Sejauhmana Keterlibatan Masyarakat Adat Dalam Program Pemberdayaan yang tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta data primer dan skuder.

Hasil pembahasan dari Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara Tahun 2015-2016 sudah dilakukan dengan baik, namun pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat di Bayan, lebih cenderung bersifat umum, karena BUMDES yang dibentuk di desa Bayan masih baru, jadi butuh waktu sehingga dapat berkembang yang menjamah ke ranah usaha yang mengarah pada potensi yang dimiliki. Selain itu juga BPMPPKBPEMDES masih mengalami kekurangan SDM yang menjadikan kendala dalam percepatan pengembangan BUMDES.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa pemberdayaan yang dilakukan berupa pembentukan BUMDES di desa Bayan adalah merupakan keputusan yang tepat, karena masyarakat dapat dilibatkan dalam pelaksanaannya yang berarti pemberdayaan

¹ SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

masyarakat tersebut memandang masyarakat sebagai subyek, walaupun belum terasa besar dampak yang diberikan tetapi pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas masyarakat akan menciptakan keberlanjutan bukan ketergantungan dan selanjutnya memandirikan kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa harus terus menerus menunggu hadirnya pemerintah.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat adat Bayan dengan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat adat Bayan dalam tingkatan perencanaan, pengambilan keputusan hingga tahap pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Lombok Utara. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) telah berdiri sejak Pemerintahan Bupati resmi pertama Kabupaten Lombok Utara. Badan ini menangani bidang yang berfokus pada pemberdayaan, namun tidak fokus pada satu sasaran saja, tapi ada beberapa yang menjadi sasaran pemberdayaan yang dilakukan yaitu ; masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan pemerintah desa.

BPMPPKBPEMDES memiliki kedudukan dalam pemerintahan ialah sebagai pendukung pemerintahan kepala daerah, dimana tugasnya untuk merencanakan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dibidang pemberdayaan. Adapun program yang telah dijalankan dan implementasikan oleh BPMPPKBPEMDES adalah program pembentukan BUMDES di masing-masing desa yang di seluruh Lombok Utara, termasuk di dalamnya adalah merupakan desa Bayan. program BUMDES tersebut adalah merupakan salah satu strategi dari visi misi tertulis Bupati terpilih dalam kampanyenya, yakni dalam menciptakan percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang menjadi landasan dari penyusunan tulisan ini dan dasar dari tujuan penelitian. Permasalahan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Apa peran BPMPPKBPEMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa) dalam pemberdayaan terhadap masyarakat adat Bayan?
- b. Sejauhmana keterlibatan masyarakat adat Bayan dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana BPMPPKBPEMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa) melakukan perannya dalam kegiatan pemberdayaan yang diimplementasikan kepada masyarakat adat Bayan di Lombok Utara.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat adat Bayan dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan BPMPPKBPEMDES dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Manfaat Penelitian ini adalah ;

- a. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lanjutan terhadap bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) kabupaten Lombok Utara, khususnya dalam penulisan ini yaitu masyarakat adat Bayan.
- b. Manfaat praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan bagi pemerintah agar memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja khususnya dalam bidang pemberdayaan terhadap masyarakat adat Bayan. Sedangkan manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat adat Bayan.

KERANGKA DASAR TEORI

Landasan teori diperlukan sebagai pondasi untuk melakukan penelitian, agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh. Seperti dinyatakan oleh Neumun (2003), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.³

PEMERINTAH

a. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organisasi elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.⁴

Menurut Talizidhu Ndraha (2003 :3) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.⁵

Sementara Samuel Edwird Finer (dalam Inu Kencana Syafi’e, 2001 : 46), menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*proses*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung, penjabat pemerintah (*the duty*) dan cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*), dari pemerintah terhadap masyarakatnya.⁶

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004 : 35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan nama trias politica baik itu legeslatif (pembuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).⁷

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2011, hal. 52.

⁴ Adam Surahman, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembanguna Pertanian di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”, Thesis, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin, Makasar, 2011, hal. 30

⁵ Ibid., hal. 31

⁶ Loc. Cit.

⁷ Loc. Cit.

b. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemerintah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

PERAN

a. Peran Pemerintah

Pemerintahan memiliki peranan dan fungsi di berbagai bidang untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan benar oleh karena itu pemerintahan sangatlah penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu unsur terbentuknya negara tanpa pemerintahan negara tidak akan lengkap dan tidak bisa di katakan sebuah negara. Adapun peranan pemerintahan sebagai berikut⁸ :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan(regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera).

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau *zona* aman.

⁸ Anonim, Apa itu Pemerintahan dan Pentingnya Pemerintahan
<http://ziaulmuhammad.blogspot.co.id/2016/02/apa-itu-pemerintahan-dan-pentingnya.html>, diakses 2014.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain⁹ :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

PEMBERDAYAAN

a. Perspektif People centered development

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengutamakan pemberian kewenangan masyarakat mulai dari pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, dan dilibatkan dalam pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan.¹⁰

Korten (2001) mendefinisikan pembangunan berpusat kepada manusia adalah. Pembangunan yang proses dari anggota-anggota suatu masyarakat yang meningkatkan kapasitas perorangan dan intitusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan apresiasi mereka.¹¹

⁹Loc. Cit.

¹⁰ Soetomo, Op.Cit., hal. 53..

¹¹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurna Ilmiah CIVIS*, No. 2, Juli, 2011, hal. 87.

Menurut Tjokrowinoto *perspetif people centered development* beranggapan bahwa masyarakat sendiri yang lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan dan potensinya, disamping memiliki kewenangan serta kemampuan untuk mengelola proses pembangunannya.¹²

b. Pemberdayaan Masyarakat

Secara Konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, serta khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan kemampuan dalam¹³;

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*).
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering, dan sustainable*”¹⁴.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi¹⁵, yaitu;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah jadi bertambah lemah, oleh karna kurang berdayaan dalam meghadapi yang kuat.

¹² Ibid.,hal. 51-52.

¹³ Chambers,etc: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk eds, *people : From Impowerrishment to Empowerment*. New York: New York University Press, 1995, hal. 98, seperti dikutip oleh Abdur Rohim, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hal. 28.

¹⁴ Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : PT Refika Aditama, 2009, hal 99, seperti dikutip oleh Abdur Rohim, Op., Cit., hal.29.

¹⁵ Loc.,Cit.

c. Tujuan Pemberdayaan

Menurut catatan Ife dalam buku Mifthacul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). “*empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*”, tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*¹⁶.

1. Kekuasaan

Realitas yang terjadi dimasyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut.

2. Kekurangberuntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka jadi kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.

d. Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komperhensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan.¹⁷

Dari konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu¹⁸:

1. Bantuan Modal,
2. Bantuan Pembangunan Prasarana,
3. Bantuan pendampingan,
4. Kelembagaan.

¹⁶ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hal 272-273.

¹⁷ Ndraha, Taliziduhu, “Kronologi ; Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta: Direksi Cipta. 2003, hal 132, seperti dikutip dari Abdur Rohman, Op.Cit., hal 34-33.

¹⁸ Mardi Yatmo Hutomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritis dan Implementasi. Jakarta: Bappenas, 2009, hal 7-10, seperti dikutip oleh Abdur Rohman, Ibid., hal. 35-37.

MASYARAKAT ADAT

a. Pengertian Masyarakat Adat

Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Social Council “masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka”.¹⁹

b. Ciri-ciri Masyarakat Adat

Selanjutnya menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu²⁰ :

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruh atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual berfungsi sebagai penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas.²¹ Adapun definisi konseptual yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah Daerah adalah suatu tugas atau perilaku yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam pembangunan,

¹⁹ Raden Prawangsa Jaya Ningrat, “Persepsi Masyarakat Adat Sasak Terhadap Pendidikan Politik Yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada Tahun 2013-2014”, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hal 20.

²⁰ Ibid., hal 21.

²¹ Shinta Doriza, “Definisi Konseptual dan Definisi Operasional”, <https://sdoriza.wordpress.com/2010/04/02/definisi-konseptual-variabel-definisi-operasional-variabel/>, diakses april 2010.

pembedayaan, serta mengatur masyarakat yang masih dalam kadar wilayah administratifnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat Adat adalah mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai alternatif pembangunan yang memandang masyarakat adat sebagai subyek bukan obyek, dan dilakukan secara terus menerus.

DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini peranan pemerintah daerah terkait masalah pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari kinerja dan program-program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPPKBPEMDES) yang diberikan kewenangan dan tugas sebagaimana yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, yakni ;

1. Bantuan Modal,
2. Pelatihan Kepengurusan,
3. Fasilitator.

Sedangkan keterlibatan masyarakat adat Bayan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPMPPKBPEMDES dalam penelitian ini dapat ditinjau dari aspek ;

1. Perencanaan,
2. Pengambilan Keputusan,
3. Pelaksanaan Kegiatan,
4. Evaluasi.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

berangkat dari jenis penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang peranan pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan terhadap masyarakat adat Bayan.

b. Unit Analisis

Penelitian ini menentukan beberapa unit analisa yakni . Unit analisa individu lebih kepada perangkat desa Bayan dan masyarakat adat sasak yang menjadi prioritas utama pada penelitian ini. Unit analisa organisasi yakni BPMPPKBPEMDES, Untuk lebih memperkecil lingkup penelitian, unit analisis wilayah dilakukan di Desa Bayan yang merupakan basis utama dari masyarakat adat di Lombok Utara. Serta untuk mendapatkan penelitian yang aktual dan terkini penulis melakukan penelitian mengacu pada tahun 2015-2016.

SUMBER DAN JENIS DATA

a. Sumber Data

1. Data Kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berupa buku maupun dokumen dari institusi terkait, pendapat para ahli maupun tokoh adat yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data Lapangan adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait, sehingga memperoleh data yang bisa dipertanggung jawabkan.

b. Jenis Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan untuk mendukung proses penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah dan buku-buku karangan para ahli yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ;

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu dengan mewawancarai kepala badan, sekretaris, pengurus sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan, dan kepala bidang pemberdayaan masyarakat yang ada di

BPMPPKBPEMDES Kabupaten Lombok utara sedangkan dari pihak masyarakat, peneliti akan mewawancarai kepala adat, Kepala desa Bayan, Pengurus BUMdes (Badan Usaha Milik Desa).

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara meninjau dokumen kantor instansi terkait yang diteliti, maupun laporan program, foto-foto kegiatan, serta melalui media internet, dan media cetak.

c. Observasi

Adapun yang diobservasi seperti hasil program pemberdayaan, aktivitas pemberdayaan, jika sedang berlangsung, aktivitas masyarakat desa.

ANALISIS DATA

Setelah data-data terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode

- a. Deskriptif yaitu dengan menerangkan sejelas mungkin tentang data-data yang telah peneliti peroleh di lapangan
- b. Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada uraian di point ini penulis akan menguraikan dari hasil penelitian sesuai dengan apa yang didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adat bayan di Lombok Utara, yang akan dibagi menjadi dua point besar, yakni peranan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

Peran pemerintah

²² Ibid., hal. 9

Sebagai tugas pemerintah untuk dapat menjamin pemerintaaan di seluruh daerah, mulai dari tingkat kota sampai tingkat desa. Salah satu program yang dilakukan untuk menciptakan pemerataan oleh pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat. Adapun peran dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut.

1. Bantuan Modal

Diketahui bahwa dalam program pemerintah modal merupakan aspek utama yang akan dilakukan, bagaimana modal tersebut akan diperuntukkan kepada masyarakat dalam menjalankan program-programnya. Pemerintah daerah Lombok Utara yang diwakilkan oleh BPMPPKBPEMDES melakukan permodalan kepada pmdirian Bumdes, yang diperuntukkan untuk modal operasional kedepannya. Dalam bantuan tersebut, BPMPPKBPEMDES tidak sebagai pemberi dari dana yang dianggarkan tersebut, melainkan lebih kepada peran untuk menjembatani antara masyrakat dengan pemerintah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan BUMDES maka secara otomatis akan melibakan BPMPPKBPEMDES. Modal yang digelontorkan ialah sebesar Rp. 100.000.000. dana tersebut akan diberikan pertahun, sehingga dalam pengembangannya BUMDES dapat lebih berkembang dan tidak sebagai lembaga bantuan modal tapi dapat menjadi *incubator* jenis usaha lain, sehingga dapat menyedot tenaga-tenaga dari masyarakat desa Bayan lebih banyak.

2. Pelatihan Kepengurusan

Untuk menjaga berjalannya suatu pemberdayaan, bahwa dirasa penting untuk meningkatkan kapasitas masyarkat selain dari hanya sekedar bantuan modal. Peran untuk peningkatan kapasitas tentu akan menghasilkan masyarakat yang dapat mandiri yang tidak hanya bergantung pada kehadiran pemerintah secara terus menerus. Setelah terbentuknya lembaga BUMDES di desa Bayan, maka secara otomatis BPMPPKBPEMDES menjadi badan yang membina BUMDES Bayan Agung. BPMPPKBPEMDES dalam melakukan pelatihan kepengurusan BUMDES berkerjasama dengan pihak lain sebagai instruktur maupun yang memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDES seluruh Lombok Utara yang diadakan dalam jangka waktu tertentu, antra 1, 2, 6 bulan sekali. Pelatihan yang dilakukan berbentuk pertemuan atau *workshop* yang dilakukan di tempat tertentu dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan berhari-hari ataupun sehari saja.

3. Fasilitator

Dalam melakukan percepatan kemandirian dapat terwujud di tengah masyrakat, maka perlu adanya sebuah fasilitas yang dapat memberikan hasil perkembangan secara cepat. BPMPPKBPEMDES memberikan Pedum kepada Bumdes Bayan untuk dijadikan acuan

dalam berjalannya lembaga Bumdes, dimana Pedum tersebut hanya baru diterbitkan di Lombok Utara, sedangkan di kabupaten lain belum disusun, hal ini menggambarkan bahwa gesitnya BPMPPKBPEMDES untuk menjaga berdirinya Bumdes di Lombok Utara. Selain itu juga BPMPPKBPEMDES melakukan rencana untuk bekerjasama dengan konsultan guna memfasilitasi BUMDES yang berdampak pada perkembangan yang signifikan. Serta BPMPPKBPEMDES juga melakukan rancangan rencana untuk mengalokasikan dana kepada BUMDES sebesar 1 miliar untuk membangun sarana berupa bangunan yang bertujuan untuk membentuk Toserba di masing-masing desa BUMDES berada.

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Dalam pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah perlu diperhatikan bahwa program pemberdayaan masyarakat tersebut dalam implementasinya melibatkan masyarakat, baik dari tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, kegiatan pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Dari program Bumdes yang diprogramkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk memberikan daya kepada masyarakat adat Bayan di Lombok Utara adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan

Dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah Lombok Utara yang diwakilkan oleh BPMPPKBPEMDES tersebut, masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembentukan BUMDES. Penting tidaknya BUMDES terhadap masyarakat adat Bayan adalah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dari perencanaan tersebut masyarakat adat dengan kepekaan aparat desa yang ada di Bayan menyadari bahwa pentingnya mendirikan lembaga yang bergerak dibidang bantuan modal untuk masyarakat Bayan. yang menghasilkan bahwa dalam perencanaan tersebut dibentuklah BUMDES pada tahun 2015 di desa Bayan yang bergerak dibidang simpan pinjam. Mengingat masyarakat Bayan dalam melakukan transaksi simpan pinjam harus menempuh jarak satu jam lebih menuju bank, dimana bank-bank tersebut berada di ibu kota kabupaten Lombok Utara yakni Tanjung. Karena hal tersebut maka dibentuklah Bumdes Bayan Agung yang sepenuhnya masih bergerak dibidang simpan pinjam.

2. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam program pemerintah dalam pemberdayaan adalah merupakan pemberian sebagian kewenangan, yang selama ini kita ketahui di negara ini pada era sebelumnya pengambilan keputusan dilakukan oleh negara atau pemerintah, jika ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan maka masih

bersifat semu. Dari apa yang ditemukan penulis dilapangan dengan mewancarai narasumber yang bersangkutan, bahwa dalam program pemerintah daerah yakni dengan pendirian BUMDES pengambilan keputusan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, yang konsensusnya ditentukan melalui musyawarah desa. Keputusan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bayan dalam program Bumdes yang bergerak dibidang simpan pinjam yakni, penentuan jumlah pinjaman maksimal kepada masyarakat desa, ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bumdes tetap berjalan. Karena disadari jika tidak ada pembatasan jumlah maksimal tersebut, maka akan ada peminjam atau nasabah yang secara besar-besaran meminjam, dan hal tersebut dapat berakibat pada tidak terpenuhinya pemerataan dalam memberikan pinjaman oleh Bumdes, dengan jumlah dana modal yang terbilang sedikit, maka pembatasan jumlah pinjaman akan menjadi salah satu cara untuk menjaga tetap eksisnya BUMDES di desa Bayan. adapun jumlah pinjamn maksimal yang ditentukan adalah sebesar Rp.5.000.000 kepada setiap keluarga, jika lebih dari jumlah tersebut tidak akan dilayani. Selain itu juga agar BUMDES dapat memberikan deviden kepada desa dan akan menunjang perkembangan dari BUMDES Bayan Agung, maka penentuan jumlah bunga pinjaman yang dilakukan melalui musyawarah desa. Jumlah bunga yang ditetntukan adalah sebesar 2,5%, ini berlandaskan dari penghasilan dari masyarakat Bayan yang terbilang serabutan dan mayoritas petani. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam program BUMDES tesebut mencerminkan bahwa program BUMDES melihat masyarakat sebagai subyek bukan Obyek, karena yang mengetahui batasan dan kemampuan masyarakat desa adalah masyarakat itu sendiri.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan. Karena keterlibatan masyarakat di dalamnya akan berdampak pada pengembagnan kapasitas masyarakat juga yang didapatkan dari pengalaman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Di dalam program pemberdayaan masyarakat yang diderivasikan melalui program BUMDES, masyarakat masuk dalam kepengurusan BUMDES, yang tidak terikat dengan pemerintah desa ataupun pemerintahan lainnya. pengurus yang dipilih dilakukan dengan cara penunjukan kandidat melalui musyawarah desa. Dalam peunjukan kandidat tersebut tidak ada penentuan atau kreteria pendidikan maupun pengalaman kerja, namun yang terbaik dari yang terbaik dan bertempat tinggal di desa Bayan minimal 2 (dua) tahun dipilih.

4. Evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi di dalam program BUMDES di desa terdapat pemisahan peran evaluasi antara pemerintah yang diwakili oleh BPMPPKBPEMDES dengan evaluasi yang dilakukan masyarakat. BPMPPKBPEMDES lebih kepada melakukan evaluasi secara keseluruhan sedangkan pada tingkat masyarakat lebih kepada internal BUMDES, ada yang berupa evaluasi individual maupun secara organisasi. Yang dimaksud dengan evaluasi individual adalah ketika pengurus BUMDES merasa bahwa dalam pengelolaannya masih mengalami kekurangan pengalaman meminta pendapat kepada pengurus BUMDES lain yang sudah berkembang untuk membagi tips dan pengalaman kerjanya dalam tata kelola BUMDES. Hal ini terjadi ketika di adakan *workshop* yang melibatkan seluruh pengurus BUMDES di Lombok Utara dan ada juga dengan berkunjung secara pribadi kerumah maupun lembaga BUMDES lain.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan-pemaparan yang peneliti temukan dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat di Bayan dalam melakukan tugasnya sebagai Badan yang berwenang BPMPPKBPEMDES berperan dimulai dari proses penganggaran dana untuk modal berdiri dan beroperasinya Bumdes. Dimana dalam proses ini BPMPPKBPEMDES sebagai aktor yang menjembatani proses penganggaran tersebut. peran kedua BPMPPKBPEMDES adalah Badan yang memberikan pelatihan pengurus Bumdes sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, karena yang terlibat atau yang ditunjuk sebagai pengurus adalah diambil dari masyarakat itu sendiri, bukan dari kalangan pemerintah daerah maupun desa. Hal ini menggambarkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Utara melau program Bumdes adalah lebih menganggap masyarakat sebagai subyek, sehingga peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk memberikan daya kepada masyarakat terlibat di dalam pemberdayaan, dan dapat menghasilkan perkembangan yang tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Peran BPMPPKBPEMDES selain dari dua hal tersebut adalah sebagai pemberi fasilitas atau faslitator Bumdes, dimana fasilitas yang diberikan ada yang sudah terealisasi atau sudah dilaksanakan, namun ada juga yang masih dalam tahap perencanaan dan sosialisasi. Adapun untuk menunjang perkembangan Bumdes Bayan Agung yang masih dalam tahap perencanaan, yakni perencanaan untuk menghadirkan konsultan di

Bumdes, dan juga perencanaan dalam pemberian fasilitas bangunan yang ditujukan untuk mendirikan BumdesMart dengan memberikan bantuan modal sebesar 1 Milyar kepada masing-masing Bumdes.

Dari keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan yang dilakukan melalui keberadaan Bumdes di desa Bayan dapat terlihat dari pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah yang dimulai sejak proses perencanaan dalam pendirian Bumdes dan pemilihan jenis usaha awal yang dijalankan, selanjutnya pada proses pengambilan keputusan dengan menentukan persentasi bunga dan nominal jumlah peminjaman maksimal yang diberikan. Pada proses lain yang melibatkan masyarakat adalah terlihat dari pengurus yang pengelola Bumdes adalah merupakan warga asli lokal yang tidak terikat dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah, yang dipilih melalui musyawarah mufakat berdasarkan hasil kualifikasi terbaik.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Bayan merupakan penerapan dari *people centered development*, dimana kewenangan dari pemerintah sebagian diberikan kepada masyarakat untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan melibatkan masyarakat didalam prosesnya.

SARAN

Dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Bayan, penulis menulis menyarankan kepada pihak pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan kemandirian yang ada di desa Bayan, langkah baiknya jika pemberdayaan dilakukan lebih menyorot potensi yang ada di Bayan, karena desa Bayan merupakan desa Budaya tertua di Lombok Utara. Sehingga lebih mengutamakan pemberdayaan yang memfokuskan terhadap pengembangan Budaya tersebut. seperti halnya desa Sade yang ada di Lombok Tengah yang mengoptimalkan desa tersebut sebagai pusat kerajinan tenun, pernak pernik, kuliner dan sebagainya maka secara otomatis dapat menciptakan kemandirian ekonomi di tengah masyarakat. Dengan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah desa dengan mendiskusikan agar Bumdes Bayan Agung lebih kepada induk usaha kebudayaan bukan secara umum seperti Bumdes pada umumnya.

2. Masyarakat seharusnya lebih peka terhadap perkembangan desa, khususnya pemerintah desa agar lebih sigap dalam melihat kebutuhan masyarakat, karena seperti yang diketahui Bumdes Bayan adalah Bumdes yang baru terbentuk, sedangkan Bumdes yang sudah terbentuk bahkan ada yang berdirinya pada tahun 2009. Sehingga tidak selalu menunggu anggaran yang besar dari pemerintah yang menjadi pemicu untuk mendirikan Bumdes, proses lebih bertahap secara perlahan dalam perbaikan akan menghasilkan yang baik juga.
3. Dalam pemberian jumlah pinjaman maksimal yang diberikan kepada masyarakat, harus ada kebijakan dari Bumdes untuk memperbolehkan mengeluarkan pinjaman besar melebihi jumlah pinjaman maksimal, karena jika dilihat dari jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, dirasa tidak mencukupi untuk dijadikan modal usaha yang besar, terlebih dalam membuka usaha yang bergerak di sektor Budaya. Namun tetap ada syarat khusus, dengan kata lain tidak dipukul rata kepada semua peminjam, melainkan lebih kepada usaha apa yang dituju dan dengan syarat-syarat tertentu, dan bila perlu dalam satu tahun jumlah peminjam dalam jumlah besar tersebut dibatasi, sehingga hal itu akan menjaga aliran dana tetap terjaga, tanpa mengesampingkan nasabah yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Eko Soetoro. 2004. *Reformasi Politik dan pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press. Yogyakarta.
- Fakih , Mansour. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Huda, Miftahul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar . Yogyakarta.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA . Bandung.

Sumber Dokumen

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa. 2016. *Pelatihan Manajemen Pengelola Bumdes*. Lombok Utara.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa. *Pedoman Umum dan Pembubaran Bumdes*. Lombok Utara.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa. 2016. *Data Perkembangan Bumdes Kabupaten Lombok Utara Sampai dengan Agustus 2016*. Lombok Utara: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pemerintahan Desa.

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten. 2011. *Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja..* Lombok Utara: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pemerintahan Desa.

Kantor Desa Bayan. 2015. *Profil Desa/ Kelurahan*. Lombok Utara: Kantor Desa Bayan.

Sumber Jurnal

Anonim. 2013. *Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta.

Haris, Herdiansyah . 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta.

Lubna. *Pengembangan Masyarakat Melalui Participatory Action Research*. Jurnal Transpormasi 4 P2M IAIN Mataram. No 1. 2013.

Mulyadi, Mohammad. *Pemberdayaan Masyarakat adat dalam Pembangunan Kehutanan*. Jurnal Penelitian sosial dan Ekonomi Kehutanan, No. 4. 2013.

Munandar, Aris. *Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Kajian Politik, dan masalah Pembangunan, No. 1. 2008.

Naruru , Ricardo F. *Masyarakat Adat Apakah Benar Bagian dari Nation State Indonesia*.

Noor, Munawar. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, No. 2. 2011.

Subhan, Ahmand. *Tiga Persoalan dan Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Junal IRE INSIGHT, No. 16. 2009.

Sumber Skripsi dan Thesis

Ningrat, R Prawangsa Jaya. 2015. *Persepsi Masyarakat Adat Sasak Terhadap Pendidikan Politik Yang dilakukan oleh Partai Demokrat pada Tahun 2013-2014*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universita Muhammadiyah Yograkarta.

Prasetyowati, Ratna. 2015. *Proses Pemberdayaan dalam Pembentukan Badan Milik Masyarakat (PBMM) oleh Business Development Servis-Provider (BDS-P) di Kota Surakarta*. Skripsi FISIP, Universitas Negeri Surakarta.

Rohim, Abdur. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surahman ,Adam. 2011. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembanguna Pertanian di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. Thesis, Ilmu Sosial danPolitk, Universitas Hasanudin, Makasar.

Sumber Internet

Anonim, 2014 Apa itu Pemerintahan dan Pentingnya Pemerintahan
<http://ziaulmuhammad.blogspot.co.id/2016/02/apa-itu-pemerintahan-dan-pentingnya.html>.

Anonim. 2003 *Sejarah Masyarakat Adat Paer Bayan. From*
<http://maraqitcabangbayan.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-masyarakat-adat-paerbayan.html>.

Kanto, Lina. 2015. *Merumuskan Definisi Operasional dan Observasi*". From: [http: //www. Ilmu psikologi .com /2015/08/ merumuskan -definisi-operasional-observasi.html](http://www.ilmu psikologi .com /2015/08/ merumuskan -definisi-operasional-observasi.html).